

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Ashiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Amalia, Husna Arina (dkk). 2014. *Seminar AKuntansi Pemerintah: Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhary, Muhamad Tahir. 2004. *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Barata, Atep Adya dan Trihartanto, Bambang. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dalman. 2013. *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Emilia, Emi. 2009. *Menulis Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Ginting, Paham (dkk). 2008. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*, Medan: USU Press.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat.

- Hanafi, Mamduh M. 2008. *Manajemen Keuangan Edisi 1*, Yogyakarta: BPFE.
- Harjito, D. Agus Dan Martono. 2011. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: EKONISIA.
- Jeddawi, H. Mutir. 2011. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media.
- Kountur, Ronny. 2009. *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Buana Printing.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sakapurnama, Eko (dkk). 2012. *Membuka Informasi Menuju Good Governance*, Jakarta: UI-Press.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance Bagian Kedua*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2012. *Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance Bagian Kedua Edisi Revisi*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. *Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soemantri, Sri. 1992. *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro, dkk (Penyunting). *Politik Pembangunan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wahyuni, Sri. 2015. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Pekanbaru: PPS UIR.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 perihal Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI.

3. Jurnal/Artikel/Tesis/Bahan-Bahan Lain

Buku CaLK. 2016. *Judul Buku: Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2014*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Modul Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat. 2014. *Judul Modul: Gambaran Umum Akuntansi Berbasis AkruaI*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli. 2007. *Judul Modul: Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Ciawi: Pusdiklatwas BPKP.

Najati, Ida (dkk). Juni 2016. *Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI: Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Volume 14, Nomor 1.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional. 2007. *Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Suhartini, Sri. 2012. *Buku Tesis "Implementasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999"*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

4. Internet

<https://riau.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>, diakses pada 30 Agustus 2018 22:15 PM.

<http://scholar.unand.ac.id/19221/2/bab%201.pdf>, diakses pada 28 Desember 2017 09:40 AM.

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/222~PMK.05~2016Per.pdf>, diakses pada 30 Agustus 2018 22:35 PM.

<https://www.kemenkumham.go.id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada 30 Agustus 2018 21:47 PM.

www.bpk.go.id, diakses pada 26 Juli 2018 22:01 PM.